



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021-2026**

**B
O
N
A
N
G
T
E
R
B
A
N
G**

Bonang, Juli 2022

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen **“Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonang Tahun 2021 - 2026”** sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Kecamatan Bonang dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Bonang dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan publik. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik bagi Pemerintah Kecamatan Bonang secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kecamatan Bonang. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Bonang, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan membawa dampak bagi peningkatan kualitas serta kinerja Kecamatan Bonang, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demak, Juli 2022

Camat Bonang
Kabupaten Demak


HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19760606 199501 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONANG 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 8

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bonang 18

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonang 21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 38

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONANG..... 43

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 43

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih... 47

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota 48

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak..... 50

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 63

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bonang 65

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 67

4.1. Tujuan dan Sasaran..... 67

BAB.V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 69

5.1.Strategi dan Kebijakan 69

BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 72

6.1.Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bonang..... 72

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 113

BAB.VIII PENUTUP 115



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tujuan untuk memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan, mengingat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kondisi dewasa saat ini, maka perlu dibuat Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bonang Tahun 2021 – 2026.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, maka Kecamatan Bonang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju terwujudnya perencanaan yang berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabuapten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, di tetapkan tanggal 23 November 2021

36. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
37. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Bonang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bonang adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bonang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Bonang

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bonang.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bonang

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Bonang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Kecamatan Bonang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONANG

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, tugas pokok Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

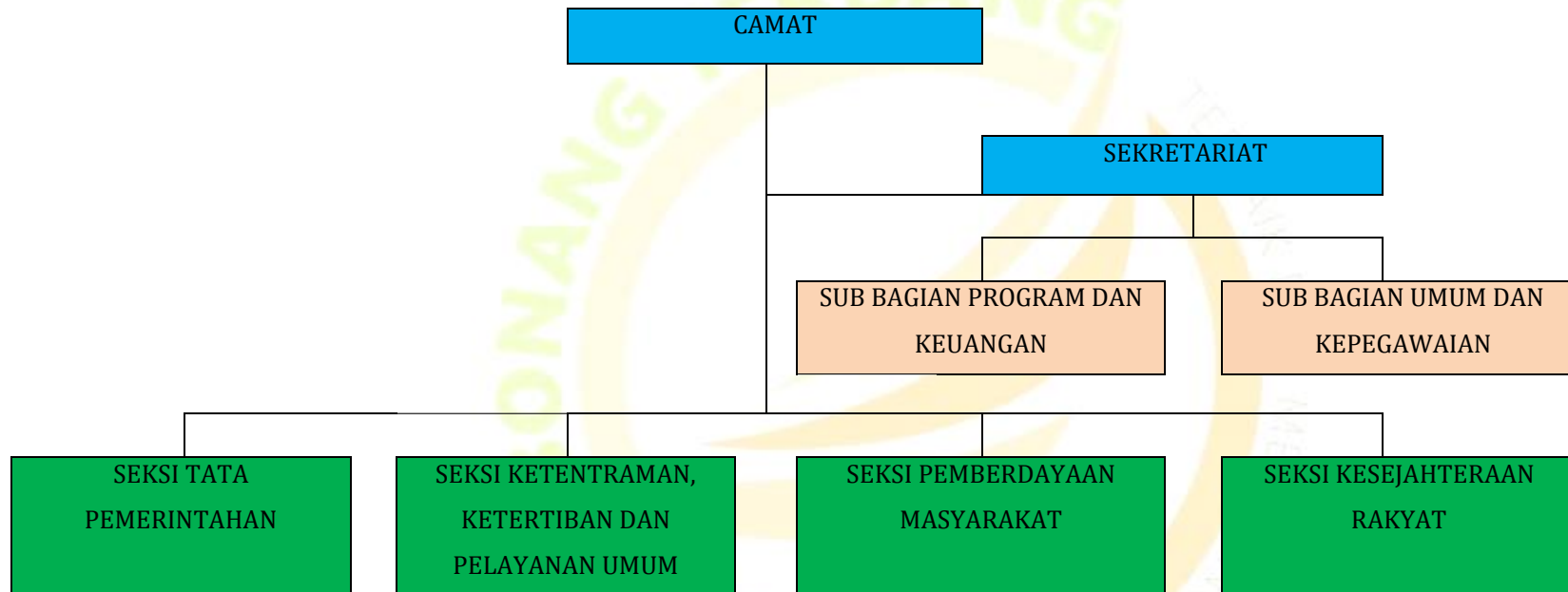
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Bonang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bonang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BONANG



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Bonang

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Kecamatan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Kecamatan;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan kecamatan;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. merumuskan kebijakan Bupati di Kecamatan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Kecamatan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. membina pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
- i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan bidang di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kesekretariatan;
- c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
- g. mengoordinasikan perencanaan program antar seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a. Kasubag Program Keuangan
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan;
- g. menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing seksi;
- i. menyiapkan dan melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);
- j. menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
- l. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

- m.mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program Dan Keuangan berdasarkan program kerja;
- n.membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. mengoordinir dan mengelola kebutuhan rumah tangga Badan sebagai unsur dukung perkantoran;
- f. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- g. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- h. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan;
- i. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi kecamatan;
- j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan

kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Tata Pemerintahan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis seksi tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa dan/atau Lurah;
- l. melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa dan/atau kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

- p. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan/atau Lurah dan perangkat desa dan/atau kelurahan;
- q. mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya di wilayah kerjanya;
- v. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- w. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan program kerja;
- x. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum

Seksi Keterteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;

- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- i. merekomendasikan persyaratan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- j. melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- k. melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;
- l. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum berdasarkan program kerja;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Bagian

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- f. merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- g. menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- i. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan program kerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- h. melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- i. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- j. melaksanakan fasilitasi, pengoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- k. melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- l. membina lembaga-lembaga adat dan keagamaan;
- m. melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;
- o. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- p. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan program kerja;
- s. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. 2 Sumber Daya Kecamatan Bonang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. **Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Bonang di klasifikasikan ke dalam Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	9	1	3	1	14
3	D3		1			1
4	S1	1		1	2	4
5	S2	2	1			3
6	S3					
	Jumlah	12	3	4	3	22

Dari jumlah PNS sebanyak 15 (lima belas) orang terdiri dari PNS Perempuan sebanyak 3 orang (5%) dan PNS laki-laki sebanyak 12 orang (1,25%) dari jumlah pegawai, ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non PNS	4	3	7
2	Golongan II	9	2	11
3	Golongan III	2	1	3
4	Golongan IV	1	0	1

Dari data diatas, 8 (delapan) orang PNS golongan II yang dalam daftar kepegawaianya masuk di PD Kecamatan Bonang, mereka adalah PNS yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa yang mana penempatannya di 8 desa di wilayah Kecamatan Bonang. Dengan dermikian jumlah PNS yang melaksanakan tugas pada PD Kecamatan Bonang hanya 7 (tujuh) orang, terdiri dari Laki-laki 4 orang dan Perempuan 3 orang

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bonang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Bonang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sarana-Prasarana di Kecamatan Bonang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	AC	2017	5	Baik
2	AC	2018	2	Baik
3	AC	2019	2	Baik
4	AC	2021	1	Baik
4	KOMPUTER	2013	1	Baik
5	KOMPUTER	2011	1	Baik
6	KOMPUTER	2017	2	Baik
7	KOMPUTER	2019	4	Baik
8	KOMPUTER	2021	2	Baik
9	LAPTOP	2010	1	Rusak Berat
10	LAPTOP	2013	1	Rusak Berat
11	LAPTOP	2014	1	Rusak Berat
12	LAPTOP	2016	1	Rusak Berat
13	LAPTOP	2020	2	Baik
14	PRINTER	2020	2	Baik
15	PRINTER	2019	3	Baik
16	PRINTER	2017	2	Baik
17	PRINTER	2016	1	Baik
18	PRINTER	2021	3	Baik
19	SCANNER	2017	1	Baik
20	SCANNER	2005	1	Rusak Berat
21	LAYAR PROYEKTOR	2018	1	Rusak Berat
22	LAYAR PROYEKTOR	2020	1	Baik
23	CAMERA	2011	1	Rusak Berat
24	CAMERA	2018	1	Baik
25	KURSI TAMU	2018	1	Baik
26	KURSI PUTAR	2017	1	Rusak Berat
27	KURSI PUTAR	2018	1	Baik
28	KURSI PUTAR	2010	4	Rusak Berat
29	MEJA KERJA	1995-2014	17	Baik
30	FILING KABINET	2012-2014	4	Baik
31	ROOLPACK	2019	1	Baik
32	AMPLIFIER	2018	1	Baik
33	LOUDSPEKER	2017	1	Baik
34	WERLES	2015	1	Baik
35	TELEVISI	1984	1	Rusak Berat
36	LEMARI	1982-2014	9	Baik
37	KENDARAAN RODA 4	2016	1	Baik
38	KENDARAAN RODA 2	2016	1	Baik
39	KENDARAAN RODA 2	2017	2	Baik
40	KENDARAAN RODA 4	2021	1	Baik

Berdasarkan data diatas, kondisi 10 perlengkapan atau aset yang dimiliki oleh Perangkat daerah Kecamatan Bonang dalam keadaan Rusak Berat dengan demikian Kecamatan Bonang masih perlu penambahan serta alokasi untuk pemeliharanya.

2. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Bonang.

2.3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Bonang

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bonang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public untuk pencapaian kinerja pelayanan publik target tahun 2017 Sampai dengan tahun 2021 adalah Target 79,92 -84,53 Sedangkan Realisasinya dari tahun 2017-2021 adalah 81,65 - 88,43 dengan demikian target sudah dapat terpenuhi sesuai yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM*)	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	v			79,92	81,25	82,31	83,55	84,53	81,65	81,76	84,56	84,43	88,85	97,88	95,85	97,33	98,93	95,13

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bonang

Total Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Bonang pada tahun 2017 Target sebesar Rp:2,734,043,- dan Realisasnya sebesar Rp:2,634,564,- Rasio 96,36%. Untuk Anggaran tahun 2016 Target sebesar Rp.2,514,504.000,- sedangkan Realisasinya Rp:2,454,136,745,- Rasio 97,60%. Untuk Anggaran tahun 2019 Target sebesar Rp:2,543,875,000,- Realisasinya sebesar Rp:2,503,714,757,- Rasio 98,42% ,Anggaran tahun 2020 Target sebesar Rp:2,873,923,855,- Realisasinya Rp:639.065,365,- Rasio 22,23% ini disebabkan terjadinya Recofusing anggaran sedangkan tahun 2021 Target sebesar Rp:2,905,978,149,- Realisasnya Rp;2,736,762,039,- Rasio 94,18% dengan demikian Anggaran yang tertinggi Rasio adalah tahun 2019 dengan Rasio 98,42% dan yang paling Rendah adalah tahun 2020 dengan Rasio 22,23 % di sebabkan adanya pengurangan anggaran atau Refocusing Sebagaimana tercantum di Tabel berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Pegawai	1.813.729.000	1.926.716.000	1.952.875.000	2.348.270.855		1.727.376.159	1.841.636.168	1.925.493.445	212.767.324		95,24	95,58	98,60	9,06			
Belanja Langsung	920.314.000	587.788.000	591.000.000	525.653.000		907.210.405	612.500.577	578.221.312	426.298.041		98,58	104,20	97,84	81,10			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	159.196.000	164.298.000	213.600.000	-	-	151.232.478	159.877.127	206.321.406			95,00	97,31	96,59			18,21%	178%
Penyediaan jasa surat menyurat	1.152.000	1.000.000,00	1.350.000			1.152.000	1.000.000	1.350.000			100,00	100,00	100,00			4,31%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.000.000	19.300.000,00	28.050.000			15.396.658	17.635.678	26.266.525			90,57	91,38	93,64			36,20%	
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.000.000					3.999.000					99,98					100,00%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000	16.500.000,00	18.000.000			11.100.000	16.500.000	18.000.000			74,00	100,00	100,00			14,55%	
Penyediaan alat tulis kantor	4.000.000	8.000.000,00	8.000.000			4.000.000	8.000.000	8.000.000			100,00	100,00	100,00			100,00%	
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	5.598.000	4.200.000,00	6.000.000			5.598.000	4.199.289	5.995.569			100,00	99,98	99,93			-3,54%	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000,00	8.500.000			5.000.000	5.000.000	8.500.000			100,00	100,00	100,00			35,00%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	4.950.000,00	4.500.000			5.000.000	4.950.000	4.500.000			100,00	100,00	100,00			-5,55%	
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per UU	3.000.000	2.500.000,00	2.500.000			3.000.000	2.036.000	2.500.000			100,00	81,44	100,00			-16,67%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan makanan dan minuman	23.425.000	15.000.000,00	30.000.000			23.425.000	14.926.000	29.800.000			100,00	99,51	99,33			14,03%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15.000.000	9.900.000,00	25.000.000			15.000.000	9.900.000	23.700.000			100,00	100,00	94,80			42,26%	
Penyediaan jasa Pegawai Non PNS	61.021.000	77.948.000,00	81.700.000			58.561.820	75.730.160	77.709.312			95,97	97,15	95,12			30,15%	
Program peningkatan sarana prasarana	370.832.000	108.200.000	157.750.000	387.847.000	-	366.946.927	106.313.450	152.249.906			98,95	98,26	96,51			23,59%	45%
Pembangunan Gedung Kantor	155.000.000					154.327.000					99,57					100,00%	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	40.332.000					40.332.000					100,00					100,00%	
pengadaan peralatan gedung kantor	63.500.000	33.000.000,00	98.300.000			62.352.727	33.000.000	98.300.000			98,19	100,00	100,00			50,91%	
pengadaan mebeleur	10.000.000	13.100.000,00				10.000.000	13.100.000				100,00	100,00				31,00%	
pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	55.000.000	6.600.000,00	5.000.000			54.610.000	6.600.000	5.000.000			99,29	100,00	100,00			-100,12%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	7.000.000	30.000.000,00	15.000.000			7.000.000	30.000.000	15.000.000			100,00	100,00	100,00			303,57%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	33.000.000	21.000.000,00	31.450.000			31.325.200	19.113.450	28.337.906			94,92	91,02	90,10			-11,48%	
Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan gedung kantor	7.000.000	4.500.000,00	4.000.000			7.000.000	4.500.000	1.612.000			100,00	100,00	40,30			-41,27%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			4.000.000					4.000.000					100,00			0,00%	
Pengadaan peralatan gedung kantor				39.600.000					39.600.000					100,00		100,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				45.000.000					45.000.000					100,00		100,00%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				38.100.000					37.701.040					98,95		100,00%	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				4.000.000					3.999.800					100,00		100,00%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				11.000.000					10.980.794					99,83		100,00%	
Penyediaan jasa surat menyurat				2.080.000					2.080.000					100,00		100,00%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				34.047.000					31.192.272					91,62		100,00%	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				4.500.000					4.500.000					100,00		100,00%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan				19.200.000					19.200.000					100,00		100,00%	
Penyediaan alat tulis kantor				8.000.000					8.000.000					100,00		100,00%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				6.000.000					6.000.000					100,00		100,00%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				2.500.000					2.500.000					100,00		100,00%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1.820.000					1.820.000					100,00		100,00%	
Penyediaan makanan dan minuman				35.000.000					35.000.000					100,00		100,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				49.000.000					28.500.000					58,16		100,00%	
Penyediaan jasa pegawai non PNS				88.000.000					79.239.984					90,05		100,00%	
Program peningkatan disiplin aparatur	12.500.000	5.600.000,00				12.500.000	5.600.000				100,00	100,00				-55,20%	-105%
Pengadaan mesin / kartu absensi	2.500.000	5.600.000,00				2.500.000	5.600.000				100,00	100,00				124,00%	
Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	10.000.000					10.000.000					100,00					100,00%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000	64.500.000,00	63.000.000	65.175.000		33.880.000	64.500.000	63.000.000	64.774.997		96,80	100,00	100,00	99,39		84,29%	-2060%
Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000	64.500.000,00	63.000.000	65.175.000		33.880.000	64.500.000	63.000.000	64.774.997		96,80	100,00	100,00	99,39		84,29%	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.000.000	1.980.000,00				3.000.000	33.000.000				100,00	6,00				-34,00%	950%
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan Anak Usia Dini	3.000.000	1.980.000,00				3.000.000	33.000.000				100,00	6,00				-34,00%	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	17.886.000	18.600.000,00	48.150.000	334.180.000		17.886.000	18.600.000	48.150.000	334.025.041		100,00	100,00	100,00	99,95		3,99%	35%
Pengendalian keamanan lingkungan	12.800.000	18.600.000,00	48.150.000	334.180.000		12.800.000	18.600.000	48.150.000	334.025.041		100,00	100,00	100,00	99,95		45,31%	
Pembinaan pedagang kaki lima	5.086.000					5.086.000					100,00					100,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	10.000.000	6.600.000,00				10.000.000	6.600.000				100,00	100,00				-34,00%	-84%
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	10.000.000	6.600.000,00				10.000.000	6.600.000				100,00	100,00				-34,00%	
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	43.000.000	28.380.000,00				43.000.000	28.380.000				100,00	100,00				-34,00%	-84%
Upacara harihari besar nasional maupun daerah	43.000.000	28.380.000,00				43.000.000	28.380.000				100,00	100,00				-34,00%	
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			52.500.000	102.798.000				52.500.000	7.998.100				100,00			70,81%	-59%
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			18.000.000	102.798.000				18.000.000	7.998.100				100,00			446,10%	
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			34.500.000					34.500.000					100,00			100,00%	
Program pencegahan dini dan pengurangan korban bencana alam	2.500.000	1.680.000,00				2.500.000	1.680.000				100,00	100,00				-32,80%	-33%

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	2.500.000	1.680.000,00				2.500.000	1.680.000				100,00	100,00				-32,80%	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			4.000.000					4.000.000					100,00			0,00%	100%
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar			4.000.000					4.000.000					100,00			0,00%	
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	15.000.000	10.000.000,00				14.880.000	10.000.000				99,20	100,00				-133,33%	-33%
Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	15.000.000	10.000.000,00				14.880.000	10.000.000				99,20	100,00				-133,33%	
Program peningkatan penghayatan, pengalaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan	45.000.000	39.900.000,00				45.000.000	39.900.000				100,00	100,00				-111,33%	-11%
Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kecamatan	15.000.000	9.900.000,00				15.000.000	9.900.000				100,00	100,00				-134,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan forum komunikasi ulama dan umaro	30.000.000	30.000.000,00				30.000.000	30.000.000				100,00	100,00				-100,00%	
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	-	48.250.000,00					48.250.000					100,00				-100,00%	
Penataan ruang terbuka hijau (RTH)	-	4.000.000,00					4.000.000					100,00				-100,00%	
Pemberdayaan Perempuan		31.590.000,00					31.590.000					100,00				-100,00%	
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	66.700.000		35.000.000	8.500.000		66.700.000		35.000.000	8.500.000		100,00		100,00	100,00		-200,71%	-100%
pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	12.500.000		35.000.000	8.500.000		12.500.000		35.000.000	8.500.000		100,00		100,00	100,00		-200,71%	
Pemberdayaan perempuan	35.000.000					35.000.000					100,00					-100,00%	
Fasilitas APBDes (DD, ADD, PADesa)	4.200.000	2.760.000,00				4.200.000	2.760.000				100,00	100,00				-134,29%	
Pembinaan dan pelaksanaan desa percontohan (Lomba Desa)	15.000.000	9.900.000,00				15.000.000	9.900.000				100,00	100,00				-134,00%	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			7.000.000					7.000.000					100,00			100,00%	100%

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin			7.000.000					7.000.000					100,00			100,00%	
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	60.500.000	21.000.000,00		15.000.000		60.485.000	21.000.000		15.000.000		99,98	100,00		100,00		-31,96%	-115%
pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	10.000.000			15.000.000		10.000.000			15.000.000		100,00			100,00		133,33%	
Pembinaan administrasi pemerintah desa	10.000.000	9.000.000,00				10.000.000	9.000.000				100,00	100,00				-10,00%	
pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	17.500.000	12.000.000,00	9.000.000			17.500.000	12.000.000	9.000.000			100,00	100,00	100,00			-43,93%	
Fasilitasi pilkades	8.000.000					8.000.000					100,00					100,00%	
Fasilitasi pegisian perangkat desa	15.000.000					14.985.000					99,90					100,00%	
Program keluarga berencana	10.000.000	8.000.000,00				10.000.000	8.000.000				100,00	100,00				-20,00%	-70%
Penacananan Kampung KB	10.000.000	8.000.000,00				10.000.000	8.000.000				100,00	100,00				-20,00%	
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	-	5.000.000,00					5.000.000					100,00				100,00%	100%
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	-	5.000.000,00					5.000.000					100,00				100,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	15.000.000	9.900.000,00				15.000.000	9.900.000				100,00	100,00				-34,00%	-34%
pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	15.000.000	9.900.000,00				15.000.000	9.900.000				100,00	100,00				-34,00%	
Program pengembangan nilai budaya	15.000.000	13.200.000,00				15.000.000	13.200.000				100,00	100,00				-12,00%	-12%
Pentas seni dan budaya	15.000.000	13.200.000,00				15.000.000	13.200.000				100,00	100,00				-12,00%	
Program pengembangan kemitraan	5.000.000	4.500.000,00				5.000.000	4.500.000				100,00	100,00				-10,00%	-10%
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata kerjasama dengan lembaga lainnya	5.000.000	4.500.000,00				5.000.000	4.500.000				100,00	100,00				-10,00%	
Program reformasi birokrasi	10.000.000					10.000.000					100,00					100,00%	100%
Peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	10.000.000					10.000.000					100,00					100,00%	
Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000	6.600.000,00	5.000.000			10.000.000	6.600.000	5.000.000			100,00	100,00	100,00			-46,12%	-240%
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	10.000.000	6.600.000,00	5.000.000			10.000.000	6.600.000	5.000.000			100,00	100,00	100,00			-46,12%	
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12.000.000	12.000.000,00				12.000.000	12.000.000				100,00	100,00				0,00%	

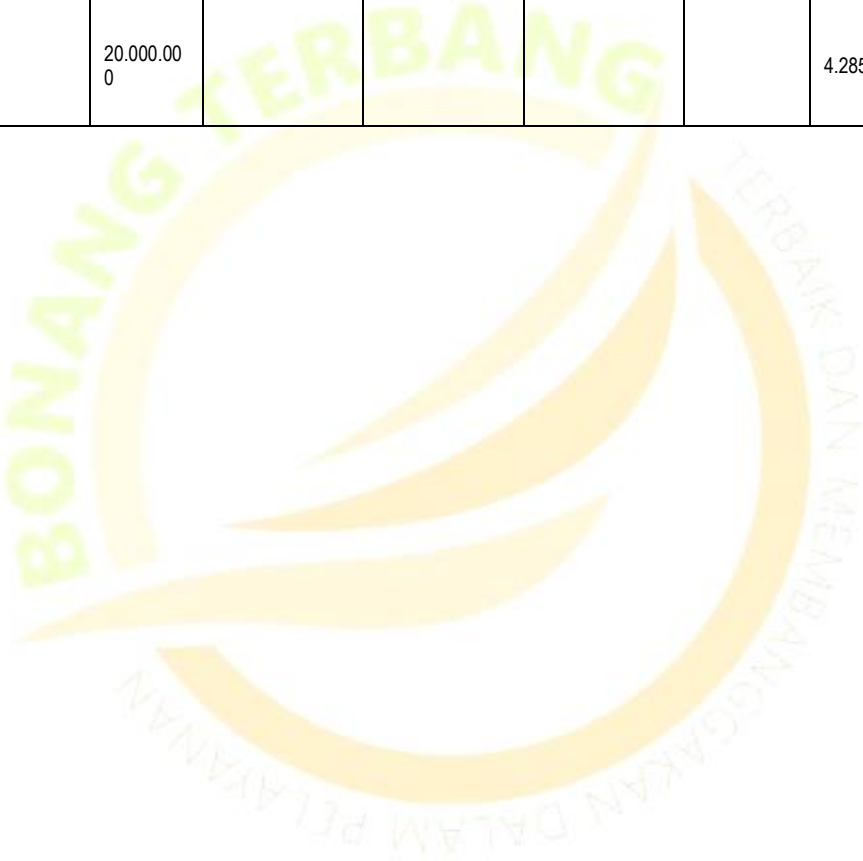
Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	12.000.000	12.000.000,00				12.000.000	12.000.000				100,00	100,00				0,00%	
Pogram pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	2.200.000	3.000.000,00				2.200.000	3.000.000				100,00	100,00				36,36%	-14%
Evaluasi rancangan peraturan dan tentang APB Desa	2.200.000	3.000.000,00				2.200.000	3.000.000				100,00	100,00				36,36%	
Program Reformasi Birokrasi		6.600.000,00	5.000.000				6.600.000	5.000.000				100,00	100,00			-24,24%	-413%
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		6.600.000,00	5.000.000				6.600.000	5.000.000				100,00	100,00			-24,24%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.136.013.549					1.504.021.716					47,96	100,00%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.482.990.000					1.252.126.716					50,43	100,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.326.390.000					1.161.366.684					49,92	100,00%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					156.600.000					90.760.032					57,96	100,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					94.250.000					83.304.600					88,39	100,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					14.250.000					14.236.200					99,90	100,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					80.000.000					69.068.400					86,34	100,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					127.161.960					77.454.058					60,91	100,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					16.000.000					12.081.598					75,51	100,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.361.960					12.824.060					66,23	100,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					49.000.000					33.100.000					67,55	100,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.000.000					2.648.400					44,14	100,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.800.000					1.200.000					66,67	100,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.000.000					15.600.000					44,57	100,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					292.975.000					-					0,00	100,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					200.000.000					-					0,00	100,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					64.400.000					-					0,00	100,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					28.575.000					-					0,00	100,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.660.000					24.307.572					59,78	100,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.160.000					530.000					24,54	100,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					38.500.000					23.777.572					61,76	100,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					97.976.589					66.828.770					68,21	100,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39.976.589					14.102.770					35,28	100,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000					50.000.000					100,00	100,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000.000					2.726.000					34,08	100,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					8.000.000					8.000.000					100,00	100,00%	100%
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					8.000.000					8.000.000					100,00	100,00%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					8.000.000					8.000.000					100,00	100,00%	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					141.200.000					82.250.000					58,25	100,00%	100%
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>					141.200.000					82.250.000					58,25	100,00%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					141.200.000					82.250.000					58,25	100,00%	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					20.000.000					4.285.000					21,43	100,00%	100%
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					20.000.000					4.285.000					21,43	100,00%	

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					20.000.000					4.285.000					21,43	100,00%	



2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Kecamatan Bonang terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Bonang, dan terdiri atas faktor kekuatan dan kelemahan organisasi pada masing-masing Urusan.

Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :

a. Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
- 3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai
- 4) Adanya Jaringan Telekomunikasi

b. Faktor Kelemahan Organisasi .

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai tentang visi misi organisasi
- 2) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- 3) Kurangnya tingkat disiplin Pegawai
- 4) Masih kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bonang
- 5) Kualitas SDM yang masih kurang memadai
- 6) Belum adanya Digitalisasi Pelayanan
- 7) Belum terjalinnya Sinergitas yang kuat

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat):

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
- 3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai

b. Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai tentang Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- 3) Keterbatasan SDM yang menangani Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Program kegiatan pemberdayaan masyarakat masih minim
- 5) Keterbatasan fungsi Kecamatan dalam menangani Pemberdayaan Masyarakat dalam tataran Koordinasi

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Bonang, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi masing-masing urusan.

Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :

a. Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- 2) Adanya potensi sumber daya alam
- 3) Adanya kebijakan yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat
- 4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
- 5) Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
- 6) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi koordinasi

b. Faktor Tantangan Organisasi :

- 1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pencapaian tujuan organisasi
- 2) Perkembangan teknologi yang semakin cepat
- 3) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
- 4) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif
- 5) Adanya Keterbukaan Informasi Publik

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat) :

a. Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- 2) Adanya potensi sumber daya alam
- 3) Adanya kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat
- 4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
- 5) Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
- 6) Infrastruktur Pemerintah Kota yang memadai
- 7) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan
- 8) Adanya FDG disetiap Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

b. Faktor Tantangan Organisasi :

- 1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pemberdayaan Masyarakat
- 2) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
- 3) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif dalam hal penanganan Masyarakat
- 4) Adanya Keterbukaan Informasi Publik
- 5) Keinginan Masyarakat yang beragam dan heterogen
- 6) Kondisi Perekonomian yang beragam
- 7) Konflik Sosial dan Ekonomi

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bonang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain :

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Bonang sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bonang harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

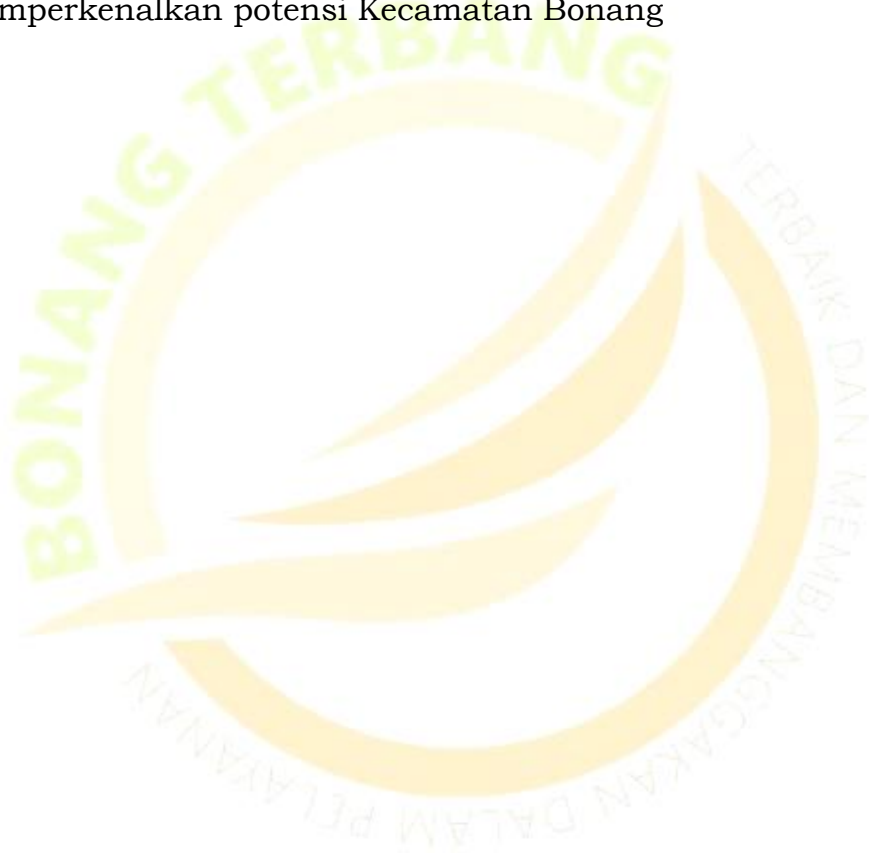
2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Bonang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antarapimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bonang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bonang, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Bonang



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN BONANG

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Bonang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Bonang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Bonang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 61 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Bonang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Bonang yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal
2. Potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola secara optimal
3. Pembangunan infrastruktur lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata
4. Potensi bencana alam dan non alam yang dihadapi masyarakat
5. Tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan masyarakat yang belum merata

Dari uraian tersebut dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
Kecamatan Bonang

No	Pokok Masalah	Permasalahan	Akar Permasalahan
1		2	3
1	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Bonang	Belum optimalnya perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah	• Tingkat pemahaman terkait regulasi perencanaan keuangan dan aset yang masih terbatas • Koordinasi lintas sektor belum optimal • Jumlah ASN yang terbatas
2	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Sarana prasarana pelayanan public yang kurang representative	• Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja seperti ruangan, kelengkapan ruangan dan alat kerja • SDM yang terbatas baik dari segi jumlah dan kapasitas
		Banjir, Rob, Kekeringan, Kebakaran	• Meluapnya air sungai yang tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi, tidak adanya normalisasi sungai secara berkala, minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. • Naiknya permukaan air laut dan turunnya permukaan tanah di kawasan pesisir • Potensi musim kemarau berkepanjangan dan konsleting arus listrik
		Infrasruktur jalan, RTLH dan permasalahan ODF	• Sumber anggaran yang belum merata serta tantangan kondisi geografis yang berbeda-beda • Tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat yang belum merata
		Tingkat Kesehatan masyarakat yang masih rendah	• Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya gizi anak • Tingkat kemiskinan yang masih tinggi • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkunganya • Adanya wabah /pandemi
		Permasalahan Anak Tidak Sekolah	• Orientasi terhadap Pendidikan yang berbeda-beda • Tingkat pendapatan antar masyarakat yang berbeda
		Kurang berkembangnya UMKM dan BUMDes	• Kurangnya pemahaman pemilik usaha akan pentingnya izin usaha dan tata cara pengajuan izin usaha • Kurangnya sarana promosi dan kreativitas pengelola / pelaku usaha untuk produk-produk lokal dan BUMDes • Manajemen pengelolaan BUMDes yang masih lemah, kurangnya kreativitas pengelola serta kurangnya dukungan dana serta pelatihan pengelolaan BUMDes
		Masih adanya konflik sosial di masyarakat	• Masyarakat masih mudah dipecah belah dengan isu yang belum jelas kebenarannya • Berkurangnya rasa toleransi antar anggota masyarakat untuk tidak mementingkan ego masing-masing
		Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat yang belum optimal	• Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa • Kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa dalam perencanaan di desa • SDM aparatur desa yang terbatas

No	Pokok Masalah	Permasalahan	Akar Permasalahan
			dari sisi kualitas • Kurang optimalnya peran Lembaga desa

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari pokok masalah **belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Bonang dan belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat**

Maka akar permasalahan dari permasalahan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan internal aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing masing.
2. Kurang optimalnya koordinasi tim perumus perencanaan pembangunan Lintas Sektor di Wilayah Kecamatan Bonang.
3. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu di setiap unsur di pemerintahan desa.
4. Kurang tertibnya pengelolaan keuangan dan aset BMD
5. SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas dalam pelayanan publik
6. Belum terintegrasinya kinerja pemerintahan berbasis IT

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bonang dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif di Kecamatan antara lain :

1. Sekretariat
 - a. Ketersediaan SDM masih kurang
 - b. Terbatasnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguataan teknologi informasi
 - c. Sistem dan adminitrasi pengelolaan keuangan berubah-ubah
 - d. Kemampuan pengarsipan masih terbatas.
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.

- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.
 - d. Kewajiban Desa menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDDes, APBDEs) dan pelaporan (LRP, LPPDes, LKJPDes) memerlukan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan dengan intensitas yang tinggi.
2. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum
- a. Tingginya potensi konflik di masyarakat.
 - b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
 - d. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
 - e. Masih belum berkembangnya BUMDes.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- a. Tingginya angka pengangguran
 - b. Tingginya tingkat kemiskinan
 - b. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
 - b. Belum optimalnya peran Satgas Covid di tingkat desa dalam percepatan penanganan Covid-19

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka **VISI** Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“ Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka **MISI** yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Program Unggulan :

1. Program peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama.
2. Program peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis “Smart Ciy”.
3. Program peningkatan kebersihan dan Keindahan Wilayah
4. Program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

5. Program pengembangan inovasi daerah
6. Program perluasan kawasan perkotaan
7. Program percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi
8. Program percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
9. Program peningkatan keberdayaan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke1.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/ Daerah sebagai suatu keharusan setiap Perangkat daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan – kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Dalam RPJMN 2019 – 2024 ada 7 agenda pembangunan yakni : 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat beberapa pernyataan terkait isu-isu strategis Kementerian dalam

negeri yang terkait dengan pelayanan masyarakat yang masih belum optimal. Hal ini juga terkait dengan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan. Dalam hal pelayanan public ini, kecamatan berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak 2021-2026 47 Republik Indonesia ini memberikan keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran yang diwujudkan oleh Kecamatan. 3.3.2. Telaah Renstra Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 menyebutkan tujuan, sasaran dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2028 – 2023 ini memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran dari Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Dan hal ini tentunya terkait pula dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan tahun 2021 – 2023.

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 menyebutkan tujuan, sasaran dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2028 – 2023 ini memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran dari Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Dan hal ini

tentunya terkait pula dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan tahun 2021 – 2023.

Adapun tujuan Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh Kecamatan adalah tujuan kedua, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi.

Sedangkan sasaran Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh Kecamatan adalah sasaran kedua dan sasaran ketiga sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat.
- b. Meningkatnya efektivitas efisiensi manajemen pemerintahan, dengan indikator kinerja nilai SAKIP.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Bonang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Bonang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Bonang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Bonang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT RW tersebut. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak untuk kawasan tan Kecamatan Bonang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikasi Program RT RW Kabupaten demak Tahun 2021-2026

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
C	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG				
1	Perwujudan Pusat Kegiatan				
	a.Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	IKK Bonang	APBD		-Bappeda -DinPUTARU
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	Kec.Bonang	APBD		-Bappeda -DinPUTARU
	-Penyusunan perauran zonasi	Kec.Bonang	APBD		-Bappeda Litbang -DinPUTARU
	-Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Kec.Bonang	APBD		-Bappeda litbang DinPUTARU
	-Pengendlia kegiatan komersial/perdagangan ,mencakup pertokoan dan pusat belanja	Kec.Bonang	APBD		-Bappeda litbang -Dinputaru
	b.Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program: 1.Penyusunan perencanaan pmbangunan kawasan perdesaan 2.Pengembangan pusat pelayanan perdesaan	Seluruh Kabupaten	APBD		-Bappeda Litbang -DinPUTARU
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi				
2.1	Sistem Jaringan Transportasi Jalan				
	a.Program pengembangan sistem prasarana jalan				
	1.Peningkatan ruas jalan nasional	Seluruh Kabupaten	APBN		- Kementerian PUPR

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	2.Peningkatan Jalan Propinsi	Seluruh Kabupaten	APBD Propinsi		- DPU Bina marga dan Cipta Karya Propinsi Jateng
	3.Peningkatan jalan Kabupaten	Seluruh Kabupaten	APBD		- Dinputaru
	4.Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah kabupaten	Seluruh Kabupaten	APBD		- Dinputaru
	5.Pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan	Seluruh Kabupaten	APBD		- Dinputaru - DinasLingkungan Hidup
	b.Pengembangan prasarana angkutan umum				
	-Peningkatan terminal type C	Kec. Bonang		APBD	-Din Perhubungan
	-Pembangunan dan peningkatan dermaga	Kec.bonang		APBD	-Din Perhubungan
2.2	Jaringan Transportasi Laut				
	-Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Bonang	APBD		- DinPUTARU - Din Hub - DinKelautan Perikanan
	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupaten Demak	Kec. Bonang	APBNi APBD		- Kemen Kelautan dan Perikanan
III	Perwujudan Sistem Energi				
3.1	Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi				
	Pengaturan pembangunan SPBU dan SPBE	Seluruh Kabupaten	APBD		- DinPUTARU
IV	Perwujudan Sistem Telekomunikasi				
	Peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan	Seluruh Kabupaten	APBN Swasta		- Kementrian Kominfo - PT Telkom - Swasta
	Pembangunan Instalansi baru dan pengoperasian instalansi penyaluran	Seluruh Kabupaten	APBN Swasta		- Kementrian Kominfo - PT Telkom - Swasta
	Peningkatan Sistem	Seluruh	APBN		- Kementrian Kominfo

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	hubungan telepon otomatis, termasuk telepon umum	Kabupaten	Swasta		- PT Telkom - Swasta
	Pengembangan menara telekomunikasi di setiap kecamatan	Seluruh Kabupaten	APBN Swasta		- Kementrian Kominfo - PT Telkom - Swasta
V	Perwujudan Sistem Sumber daya Air				-
	Pembangunan Bendungkaret Kali kontrak, Kabupaten Demak	Kec.Bonang	APBN		- Kementrian PUPR
	Pembangunan Embung	Kec.Bonang	APBN APBD Propinsi APBD		- -Kementrian PUPR - Dinas PUSDATARU Prop Jawa Tengah - DinPUTARU
	Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air	Seluruh kabupaten	APBD		- DinPUTARU - DinPUTARU - Din LH
	Pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam	Kec.bonang	APBD		- DinPUTARU - DinLH
	Penetapan kawasan imbuhan air tanah untuk menjadi kawasan lindung	Seluruh Kabupaten	APBD		- Din LH
	Penyusunan daya tampung sungai dan air permukaan	Seluruh Kabupaten	APBD		- Dinas LH
	Monitoring dan pengawasan terhadap buangan limbah industri dan rumah tangga untuk memastikan daya tampung sungai dalam status baik	Seluruh Kabupaten	APBD		- Di LHn
VI	Perwujudan Sistem Prasaran lainnya				-
	a.Sistem Persampahan				-
	Peningkatan dan Pengembangan TPA	Seluruh Kab	APBN APBD		- Kementrian PUPR - DinPUTARU

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
					- Din LH
	Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST	Seluruh Kab	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	Program pengelolaan sampah 3 R	Seluruh Kab	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu	Seluruh Kab	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	Usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antar sampah organik dan non organik	Seluruh Kab	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	Kajian Teknologi pemanfaatan energi dari sampah di tingkat TPA	Seluruh Kab	APBD		- Din LH
	Pembangunan instalansi energi dari sampah di tingkat TPA	Seluruh Kab	APBD		- Din LH
	b.Sistem Jaringan air Minum				-
	Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR)	Seluruh Kab	APBD		- Din Putaru - PDAM
	Pengembangan Jaringan distribusi utama	Seluruh Kab	APBD		- Din PUTARU - PDAM
	Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan seluruh kecamatan	Seluruh Kab	APBD		- Din PUTARU - PDAM
	c.Sistem Jaringan Air Limbah				-
	Pemantapan instalansi pengolahan limbah tinja	Kec.Bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	Pengembangan Sistem Pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan	Seluruh Kab	APBN APBD Propinsi APBD		- Kementrian PUPR - Din PUSDATARU Jateng - Din PUTARU - Din LH

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	d.Sistem Jaringan Drainase				-
	Penyusunan masterplan drainase	Seluruh Kab	APBD		- Din PUTARU
	Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan	Seluruh kab	APBD		- Din PUTARU
	Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder	Seluruh kab	APBD		- Din PUTARU
	Normalisasi saluran sungai	Seluruh Kab	APBN APBD propinsi APBD		- Kementrian PUPR - DinPUSDATARU jateng - Din PUTARU
	e.Sistem Evakuasi Bencana				-
	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kec.bonang	APBD		- Din PUTARU - BPBD
	Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kec Bonang	APBD		- DinasPUTARU - Dinas LH
	b.Kawasan perlindungan setempat				-
	1.Arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran dilakukan melalui program :				-
	-.Penetapan sempada sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD		- Din PUTARU - DinLH
	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi	Seluruh Kec	APBD		- Din PUTARU - DinLH
	-Penertiban bangunan diatas saluran irigasi	Seluruh Kec	APBD		- Din PUTARU - DinLH - Satpol PP
	-Penghijauan	Seluruh Kec	APBD		- Din PUTARU

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
					- DinLH
	2.Arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui program				-
	Penetapan batas sempadan pantai -Pengelolaan kawasan tanah timbul	Kec.Bonang	APBD		- Din PUTARU - Din Kelautan dan Perikanan - Din PUTARU - Din Kelautan dan Perikanan - Din LH
	Penetapan batas kawasan pasang surut	Kec.Bonang	APBD		- Din PUTARU - Din Kelautan dan Perikanan - Din LH
	- Penghijauan	Kec.Bonang	APBD		- Din PUTARU - Din Kelautan dan Perikanan - Din LH
	3.Arahan perlindungan sempadan embung				-
	-Penetapan batas sempadan embung	Kec.Bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	-Penertiban pemanfaatan ruang disekitar embung	Kec.Bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	- Pengelolaan embung	Kec.Bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	Pembangunan tanggul penahan abrasi	Kec.Bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LH
	Penghijauan tepi pantai	Kec.Bonang	APBD		- Din LH - Din Kelautan dan Perikanan
	c.Kawasan Ekosistim Mangrove				-
	Arahan perlindungan kawasan ekosistem	Kec.Bonang			-

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	mangrove dilakukan melalui program				
	- Pelestarian keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya	Kec.Bonang	APBD		- Din LH - Din Kelautan dan Perikanan
	- Percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak	Kec.Bonang	APBD		- Din LH - Din Kelautan dan Perikanan
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kec.Bonang	APBD		- Din LH - Din Kelautan dan Perikanan
	d.Kawasan Bencana Alam				-
	1.Arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui program:				-
	- Pembangunan tanggul penahan abrasi	Kec.bonang	APBN APBD propinsi APBD		- Kementrian PUPR - Din PUSDATARU prop jateng - DinPUTARU - DinLH - BPBD
	- Penghijauan tepi pantai	Kec.Bonang	APBD		- DinLH - Din Kelautan dan Perikanan
	2.Arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program				-
	-Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan penduduknya	Kec.Bonang	APBN APBD Propinsi APBD		- Kementrian PUPR - - DinPUDATARU Jateng - DinPUTARU - Di LH - BPBD
	Melakukan Program		APBD		- BPBD

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir				
	3Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program ;				-
	-Pembangunan sumur dalam	Kec.Bonang	APBN APBD propins APBD		- Kementrian PUPR - DinPUSDATARU Jateng - DinPUTARU - DinLH - BPBD
	-Pengembangan bangunan penyimpanan air	Kec.Bonang	APBN APBD propins APBD		- Kementrian PUPR - DinPUSDATARU Jateng - DinPUTARU - DinLH - BPBD
	-Pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air	Kec.Bonang	APBN APBD propins APBD		- Kementrian PUPR - DinPUSDATARU Jateng - DinPUTARU - DinLH - BPBD
	4 Arahan perlindungan kawasana angin topan dilakukan melalui program				-
	-Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Kec.Bonang	APBD		- DinPUTARU - BPBD
	-Pengembangan jalur ruang evakuasi	Kec.Bonang	APBD		- DinPUTARU - BPBD
	-Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan	Kec.Bonang	APBD		- DinPUTARU
	g.Kawasan Lindung Geologi				-
	-Pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi	Seluruh Kab	APBD		- DinPUTARU

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah				
	-Membatasi eskplotasi air tanah dalam secara berlebihan	Seluruh Kab	APBD propinsi		- Din ESDM Propjateng
	-Kerjasama pengelola CAT dengan pemerintah daerah lain	Seluruh Kab	APBD propinsi		- Din ESDM Propjateng
	-Pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutlah	Seluruh Kab	APBD		- Din LH
	-Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Seluruh Kab	APBD		- Din LH
II	Perwujudan Kawasan BUdidaya				-
	a.Perwujudan dan Kawasan Pertanian				-
	1.Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mmendukung program ketahanan pangan nasional	Seluruh Kabupaten	APBD propinsi APBD		- Dinas Pertanian,tanaman pangan dan Holtikultura Prop jateng - -Dipertan
	2.Pengembangan tanaman semusim produktif dikawasan pertanian holtikultura	Seluruh Kabupaten	APBD propinsi APBD		- Dinas Pertanian,tanaman pangan dan Holtikultura Prop jateng - -Dipertan
	3.Peningkatan produksi tanaman perkebunan dan buah-buahan	Seluruh Kabupaten	APBD propinsi APBD		- Dinas Pertanian,tanaman pangan dan Holtikultura Prop jateng - -Dipertan
	4.Pengembangan peternakan	Seluruh Kabupaten	APBD propinsi		- Dinas Pertanian,tanaman pangan dan Holtikultura Prop jateng
					-
	c.Perwujudan Kawasan Perikanan				-

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	1.Koordinasi dengan pemerintah propinsi penetapan zona penangkapan ikan	Kec.Bonang	APBD		- Din Hub - Din LutKan
	2.Peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI	Kec.Bonang	APBD		- Din Hub - Din LutKan
	3.Pengembangan produksi perikanan tambak	Kec.Bonang	APBD		- DinLutkan
	4.Pengembangan Pengolahan rajungan Kabupaten Demak	Kec.Bonang	APBD		- DinLutkan
	5.Peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar	Kec.Bonang	APBD		- DinLutkan
	6.Pengembangan UMKM pengolah hasil perikanan	Kec.Bonang	APBD		- DinLutkan
	d.Perwujudan Kawasan Pertambangan				-
	1.Identifikasi potensi tambang	Seluruh Kab	APBD propinsi		- Din ESDM Propjateng
	2.Penetapan kawasan pertambangan yang dapat diekplorasi	Seluruh Kab	APBD propinsi		- Din ESDM Propjateng
	3.Pemulihan kesuburan tanah dan reklame permukaan tanah	Seluruh Kab	APBD propinsi		- Din ESDM Propjateng
	e.Perwujudan kawasan industry				-
	1.Mengarahkan kegiatan industry ke kawasan industry	Seluruh Kab	APBD		- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	2.Pengembangan industry berbasis pertanian(agroindustri)	Seluruh Kab	APBD		- Dipertan
	3.Penetapan daya dukung dan tamping lingkungan hidup pada setiap kawasan industry	Seluruh Kab	APBD		- Dindagkop UKM - Din LH
	4.Penyediaan prasarana dan	Seluruh Kab	APBD		- Dinas perindustrian dan

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	sarana kawasan industry(termasuk penyediaan air untuk kepentingan industry)				tenaga kerja
	Peningkatan Kualitas SDM untuk mendukung penyediaan tenaga kerja	Seluruh Kab	APBD		- Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
	f.Perwujudan kawasan pariwisata				-
	1.Penyediaan Sarana dan Prasarana permukiman perkotaan	Seluruh Kab	APBN APBD PROPINSI APBD		- Kementrian PUPR - Dinas Perakim Prop Jateng - DinPUTARU - DinPerkim
	2.Mengembangkan fasilitas ruang public dan ruang terbuka hijau kota	Seluruh Kab	APBN APBD PROPINSI APBD		- Kementrian PUPR - Dinas Perakim Prop Jateng - DinPUTARU - DinPerkim
	3.Penyediaan berbagai fasilitas social ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan	Seluruh Kab	APBN APBD PROPINSI APBD		- Kementrian PUPR - Dinas Perakim Prop Jateng - DinPUTARU - DinPerkim
	h.Perwujudan Kawasan permukiman perdesaan				-
	1.Pengembangan Kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian	Seluruh Kab	APBN APBD PROPINSI APBD		- Kementrian PUPR - Dinas Perakim Prop Jateng - DinPUTARU
	2.Pengembangan kawasan perdesaan melalui: -.Pembentukan PPL,danPengembangan keterkaitan social ekonomi antara PPL dengan wilayah	Seluruh Kab	APBD		- Bappeda litbang

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	pelanyannany				
	3.Penyediaan berbagai fasilitas social ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan	Seluruh Kab	APBN APBD PROPINSI APBD		- Kementrian PUPR - Dinas Perakim Prop Jateng - DinPUTARU - DinPerkim
E	Perwujudan Kawasan Strategis				-
	a.Perwujudan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada dio Kecamatan Bonang				-
	- Peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Kec.bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LutKan
	- Pemeliharaan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi	Kec.bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LutKan
	- Peningkatan Fasilitas dan prasarana kepelabuhan	Kec.bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LutKan
	- Peningkatan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Kec.bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LutKan - DinParta
	b.Kawasan Rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung,Bonang dan Bonang				-
	- Pembangunan sarana penahan gelombang	Kec.bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LutKan
	- Penghijauan kawasan pantai	Kec.bonang	APBD		- Din PUTARU - Din LutKan
	- Rehabilitasi tanah-	Kec.bonang	APBD		- Din PUTARU

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	tanah bekas terkena abrasi				- Din LutKan

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan isu strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola untuk tujuan pembangunan dari Kecamatan Bonang sebagai berikut :

Tabel 3.3

Isu Strategis Lingkungan TPB Kabupaten Demak – Pilar Hukum dan Tata Kelola

No TPB	Tujuan Pembangunan	Isu Strategis
	NIHIL	

Sasaran strategis, merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian TPB di Kabupaten Demak. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yang telah ditemukan. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada RPJMD selanjutnya. Berikut merupakan sasaran strategis menurut pilar pembangunan berkelanjutan Kecamatan Bonang.

Tabel 3.4

Tabel 0.1 Sasaran Strategis Kabupaten Demak Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu Stretegis	Permasalahan Strategis	Sasaran Strategis
	NIHIL	

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kabupaten Demak. Program ini harus sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2018. Berikut merupakan program yang dapat disusun untuk mencapai TPB di Kabupaten Demak yang berhubungan dengan Kecamatan Bonang.

Tabel 3.5

Rekomendasi Pencapaian TPB
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Isu Stretegis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendan aan	OP D
						2022	2023	2024	2025	2026			
NIHIL..													

Sumber: Laporan KLHS Kota/Kabupaten Demak

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bonang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RTRW Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai berikut :

3.6.1 Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)

1. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga terkait;
2. Adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
3. Adanya inovasi manajemen pelayanan di kecamatan yang menuntut Kecamatan Bonang lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
4. Semakin transparansi informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bonang harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Adanya perkembangan teknologi yang cepat dan pesat dalam percepatan perolehan dan pentransferan informasi dalam menunjang kinerja pemerintah pada umumnya dan kinerja Kecamatan Bonang pada Khususnya. Salah satu implelemntasinya dalam wujud penerapan *e-goverment* yang di dalamnya dijabarkan dalam bentuk *e-budgeting*, *e-audit*, *e-perfomance*.
6. Adanya keterbukaan Informasi Publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan.

3.6.2 Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan

Masyarakat Desa)

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Bonang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya peningkatan peran wanita dan anak dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan pemerintah. Upaya pengarusutamaan gender dan peran serta anak dalam pembangunan
3. Daerah rawan rob di wilayah Kecamatan Bonang menuntut penanganan serius.
4. Penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu adanya program peningkatan kecamatan dan desa layak anak

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, rumusan strategi perencanaan dalam menghadapi isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang dihadapi Kecamatan Bonang adalah :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Bonang
2. Pemanfaatan peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan hubungan kerja dan koordinasi antar PD.
5. Peningkatan keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran, program dan kegiatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), dinyatakan bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Demak berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Kecamatan Bonang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bonang.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Bonang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Bonang.

Adapun tujuan Kecamatan Bonang untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang
2. Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Bonang

Sasaran Kecamatan Bonang yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Bonang.
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bonang	Meningkatnya Capaian Sasaran strategis Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas atas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Angka	74,69	75,68	76	77	78	79	80	80
			Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persentase dari tingkat capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan pelayanan public Kecamatan Bonang	Terwujudnya pelayanan public yang responsif	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Angka	89	89	89	90	91	92	93	93
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Keluhan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Bonang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bonang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-

masing sasaran Renstra Kecamatan Bonang dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Bonang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Bonang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Bonang.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Kecamatan Bonang Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas layanan internal pemerintahan	V	V	V	V	V
	Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	V	V	V	V	V
	Penguatan tata kelola kelembagaan dan system pemerintahan	V	V	V	V	V
	Peningkatan system pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	V	V	V	V	V
	Penertiban pengelolaan keuangan dan asset(kekayaan) daerah	V	V	V	V	V
	Peningkatan kualitas kinerja SDM aparatur dari sisi kompetensi dan penempatan kerja	V	V	V	V	V

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

VISI : Demak Bermartabat, Maju dan ejahtera			
MISI : 1.Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan pelayanan Publik Kecamatan Bonang	Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas layanan internal pemerintahan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang		Peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bonang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bonang sebagai unsur kewilayahan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program tersebut fokus pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam wujud pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Kaarantengah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan instansi vertikal lainnya. Selain focus pada kegiatan tersebut, pada program ini juga focus dalam kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dalam wujud pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dalam pelayanan administrasi non perijinan dan sosialisasi dalam pengurusan perizinan usaha mikro dengan menyesuaikan regulasi yang berlaku.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini fokus pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam wujud pelaksanaan kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang pekerjaannya berupa Musrenbang tingkat kecamatan. Pada program ini juga fokus dalam pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan. Pada kegiatan ini fokus pada rencana implementasinya berupa pelatihan UMKM yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini focus pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam wujud pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan, dan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang mendukung rencana implementasi Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini fokus pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dalam wujud pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa peringatan hari besar nasional maupun daerah, dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal pencegahan dan mitigasi bencana alam.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini fokus pada pemberian fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam wujud pelaksanaan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan

Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bonang sebagai program rutin. Program ini terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program unggulan Bupati yang ada di Kecamatan Bonang tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 6.1. Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bonang terdapat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Bonang

No	Program/Indikator Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama																
	Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'	Jumlah peserta FKUU di laksanakan di tingkat Kecamatan	kegiatan	63 orang	2	75.000.000	2	75.000.000	2	76.000.000	2	76.000.000	2	77.000.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat
2	Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat																
	Pelatihan UMKM	Jumlah peserta pelatihan UMKM	UMKM	50 orang	40	25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Tujua n	Sasar an	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Loka si		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
										Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)	
			PRO GRA M	KEG IATA N	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			Ta rg et	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Menin gkatka n Akunt abilita s Kinerj a Keca matan Bonan g	Menin gkatny a Capai an sasara n strate gis Keca matan Bonan g					Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	74 .6 9	75 .6 8	75. 68		76		77		78		79		80		80		Keca matan Bona ng	Keca mata n Bona ng
								Persentase Kinerja Sasran Strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persen	10 0	10 0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan Evaluasi Kecamatan Bonang yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	2,663,778,149	100	2,348,266,819	100	2,489,097,155	100	2,569,856,806	100	2,746,195,700	100	2,859,502,018	100	13,012,918,498	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70101202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen keuangan	Dokumen		12	12	2,074,454,600	12	2,103,516,819	12	2,110,517,155	12	2,109,556,806	12	2,237,095,700	12	2,339,002,018	60	10,899,688,498	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1			Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070101202001			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	19	19	1,927,154,600	18	1,951,316,819	18	1,950,517,155	18	1,949,556,806	18	2,067,095,700	18	2,149,002,018	90	10,067,488,498	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070101202002			Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	11	11	11	147,300,000	11	152,200,000	12	160,000,000	12	160,000,000	12	170,000,000	12	190,000,000	59	832,200,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)	
1	2	3	4			5	6	7	8	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	23	24
		7.01.0 1.2.03		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen							9	6,000,000	9	9,000,000	9	15,000,000	9	18,000,000	36	48,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70101 20101			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							3	2,000,000	3	3,000,000	3	5,000,000	3	6,000,000	12	16,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1			Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
			PRO GRAM	KEG IATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			Ta rg et	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70101 20102			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen							2	1,000,000	2	2,000,000	2	2,500,000	2	3,000,000	8	8,500,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70101 20104			koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen							2	1,000,000	2	2,000,000	2	2,500,000	2	3,000,000	8	8,500,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp			Ta rget	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70101 20106			koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan							2	2,000,000	2	2,000,000	2	5,000,000	2	6,000,000	8	15,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Bonang						Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	89	89	89		89		90		91		92		94		94		Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penerima dan Pengguna	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2					Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)												
PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif					Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Bonang	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persen	100	100	100	589,323,549	100	244,750,000	100	372,580,000	100	451,300,000	100	494,100,000	100	502,500,000	100	2,065,230,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2					Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)												
PRO GRAM	KEG IATAN	SUB KEGIATAN	20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70101205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100	88,290,000	100	50,000,000	100%	83,180,000	100	96,500,000	100	98,800,000	100	99,000,000	100	427,480,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070101205002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	18	18	18	14,250,000	0		22	16,500,000	22	16,500,000	22	18,000,000	24	18,000,000	90	69,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070101205009			Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22	22	22	74,040,000	22	50,000,000	22	61,680,000	22	75,000,000	22	75,800,000	24	76,000,000	112	338,480,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0				42	5,000,000	42	5,000,000	42	5,000,000	42	5,000,000	168	20,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70101206		Administrasi UmumPerangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100	82,736,960	100	80,800,000	100	94,900,000	100	95,300,000	100	119,300,000	100	118,800,000	100	509,100,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070101206001			Penyediaan Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	8	16,000,000	8	5,000,000	8	5,500,000	8	5,500,000	8	6,500,000	8	6,000,000	40	28,500,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penerima Anggaran	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1			Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
			PRO GRAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			Ta rg et	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070101206002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	49	49	49	23,936,960	49	20,000,000	49	20,000,000	49	20,000,000	49	23,800,000	49	26,000,000	245	109,800,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070101206003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket							5	5,000,000	5	5,000,000	5	7,000,000	5	5,000,000	20	22,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Bulan	12	12	12	49,000,000														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		07010 12060 0 5			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20 00 0	20 00 0	20 00 0	6,000,000	20 00 0	6,000,000	22 00 0	6,600,000	14 00 0	7,000,000	20 00 0	10,000,000	25 00 0	10,000,000	10 10 00	39,600,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		07010 12060 0 6			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	2,000,000	12	1,800,000	60	9,200,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1			Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		07010 12060 0 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	35,00 0,000	15 27	48,00 0,000	15 27	48,00 0,000	15 27	48,00 0,000	16 00	60,00 0,000	16 00	62,00 0,000	77 81	266,00 0,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		07010 12060 0 10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen							5	5,000,000	5	5,000,000	5	7,000,000	5	5,000,000	20	22,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		0701012060011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen							4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	16	12,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70101207			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	1	8	264,400,000	4	23,000,000	7	50,000,000	78	82,000,000	6	91,000,000	7	84,600,000	98	330,600,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070101207002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	1	1	200,000,000	0	0	0	0	1	17,000,000	1	30,000,000	1	34,600,000	3	81,600,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070101207005			Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-			-	3	6,300,000	4	12,000,000	74	15,000,000	2	7,000,000	4	10,000,000	87	50,300,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1			Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070101207006			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7	7	64,400,000	1	16,700,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	34,000,000	1	20,000,000	8	130,700,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		7010120710			Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	Unit				1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	35,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penerima Anggaran	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			2020	2021	Target					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		7010120711			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	Unit				1	3,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	33,000,000	Kecamatan Bona ng	Kecamatan Bona ng
		70101208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Laporan	100%		100	40,660,000	100	40,950,000	100	51,000,000	100	52,500,000	100	52,500,000	100	57,500,000	100%	254,450,000	Kecamatan Bona ng	Kecamatan Bona ng
		07010120801			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	500	500	2,160,000	500	2,450,000	500	2,500,000	500	2,500,000	500	2,500,000	500	2,500,000	2500	12,450,000	Kecamatan Bona ng	Kecamatan Bona ng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			2020	2021	Target					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070101208002			Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air,dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	38,500,000	3	38,500,000	3	48,500,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	55,000,000	15	242,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70101209			Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	unit	29	27	27	113,236,589	28	50,000,000	37	93,500,000	42	125,000,000	45	132,500,000	44	142,600,000	196	543,600,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			PRO GRAM	KEG IATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			Ta rg et	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		07010 12090 0 1			Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	6	39,97 6,589	6	40,00 0,000	1	10,00 0,000	1	15,00 0,000	1	16,00 0,000	1	17,00 0,000	10	98,000 ,000	Kecamatan Bona ng	Kecamatan Bona ng
		07010 12090 0 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit							7	30,00 0,000	8	45,00 0,000	9	50,00 0,000	10	50,00 0,000	34	175,00 0,000	Kecamatan Bona ng	Kecamatan Bona ng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2					Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)												
PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070101209006			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	20		20	0	24	10,000,000	25	10,000,000	26	11,000,000	27	12,100,000	122	43,100,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070101209005			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0				0	-	1	500,000	4	2,000,000	5	2,500,000	1	500,000	11	5,500,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			PRO GRAM	KEG IATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70101209009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	65,260,000			1	30,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	2	50,000,000	5	160,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70101209010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2			8,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	10	50,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penerima Anggaran	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70101209011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	4	12,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Bonang						Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	89	89	89		89		90		91		92		94		94		Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PROGR AM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN					Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif					Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen	100				100	10,000,000	100	10,000,000	100	40,000,000	100	11,000,000	100%	50,000,000	100%	121,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2					Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)												
PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70102201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	8					0	0	8	5,000,000	1	35,000,000	8	5,500,000	8	40,000,000	25	85,500,000	Kecamatan Bona ng	Kecamatan Bona ng
		07010220101		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	8					0	0	8	5,000,000	1	35,000,000	8	5,500,000	8	40,000,000	25	85,500,000	Kecamatan Bona ng	Kecamatan Bona ng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
										Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)	
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			Ta rg et	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70102204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah dokumen laporan Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan Camat	Orang	50				50	10,000,000	60	5,000,000	65	5,000,000	70	5,500,000	75	10,000,000	270	25,500,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070102204001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan							60	5,000,000	65	5,000,000	70	5,500,000	75	10,000,000	270	25,500,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEG IATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)	Ta rg et	Rp									
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070102204003			Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang Terkait Dengan kewenanga n lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lapora n	50				50	10,00 0,000											Keca matan Bona ng	Keca mata n Bona ng
		70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			Persentase Lembaga Pembedayaan Masyarakat yang aktif	Persen	10 0	10 0	10 0	8,000, 000	10 0	35,00 0,000	10 0	30,00 0,000	10 0	45,00 0,000	10 0	47,00 0,000	10 0	59,20 0,000	10 0%	216,20 0,000	Keca mata n Bona ng	Keca mata n Bon ang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1			Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70103201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	Dokumen	2	2	2	8,000,000	2	35,000,000	2	30,000,000	2	45,000,000	2	47,000,000	2	59,200,000	10	216,200,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070103201001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	21	21	21	8,000,000	21	10,000,000	21	10,000,000	21	25,000,000	21	25,000,000	21	35,000,000	105	105,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)											
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070103201002			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	1		1	25,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	5	111,200,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan Keamanan Wilayah	persen	100			141,200,000	100	175,000,000	100	70,595,000	100	276,195,000	100	71,329,750	100	81,600,000	100	674,719,750	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2					Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)												
PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70104201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	2	1	1	141,200,000	2	175,000,000	2	66,195,000	2	266,195,000	2	66,329,750	2	70,000,000	10	643,719,750	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070104201001			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1	141,200,000	1	100,000,000	1	36,195,000	1	236,195,000	1	36,329,750	1	37,000,000	5	445,719,750	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070104201002			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1				1	75,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	33,000,000	5	198,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70104202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	Laporan	1					-	1	4,400,000	1	10,000,000	1	5,000,000	1	11,600,000	4	31,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			PRO GRAM	KEG IATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp			Ta rget	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070104202001			Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1					-	1	4,400,000	1	10,000,000	1	5,000,000	1	11,600,000	4	31,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100				100	5,000,000	100	15,000,000	100	60,800,000	100	45,250,000	100	86,222,500	100	212,272,500	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
							20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70105201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum	Laporan	2				2	5,000,000	2	15,000,000	2	60,800,000	2	45,250,000	2	86,222,500	2	212,272,500	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		07010520101		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Orang	30						70	10,000,000	70	55,800,000	70	40,000,000	70	80,000,000	280	185,800,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1			Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp			Ta rget	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
		070105201005			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1				1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,250,000	1	6,222,500	5	26,472,500	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
							2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		70106	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persen	100			20,000,000	100	28,000,000	100	21,000,000	100	50,000,000	100	31,600,000	100	85,000,000	100	215,600,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		70106201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	Dokumen	6	1	1	20,000,000	3	28,000,000	5	21,000,000	4	50,000,000	5	31,600,000	25	85,000,000	42	215,600,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			Tahun 0		Tahun 1			Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
			PRO GRAM	KEG IATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		07010 62010 0 1			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1					-	1	2,000,000	1	5,000,000	1	2,200,000	21	10,000,000	24	19,200,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		07010 62010 0 2			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1					-	1	2,000,000	1	5,000,000	1	2,200,000	1	10,000,000	4	19,200,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
			PRO GRAM	KEG IATAN	SUB KEGIATAN			20 20	20 21	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp			Ta rget	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070106201003			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1				1	12,000,000	1	2,000,000	1	5,000,000	1	2,200,000	1	10,000,000	5	31,200,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070106201005			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1								-		-	1	10,000,000	1	10,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
			Tahun 0		Tahun 1					Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)							
																		Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			Ta rg et	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		070106201006			Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1				1	3,000,000	1	2,000,000	-	-	1	5,000,000	-	-	3	10,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang
		070106201012			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	1	1	20,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	35,000,000	1	20,000,000	1	45,000,000	5	126,000,000	Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Bonang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Bonang yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Indikator				Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		IKU	SPM	IKK	SDGs		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	V				Angka	74,69	75.68	76	77	78	79	80	80
2	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan yang mencapai target	V				Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indek Kepuasan Masyarakat	V				Angka	89	89	89	90	91	92	94	94
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V				Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonang yang lebih konkrit akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Kecamatan Bonang setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis Kecamatan Bonang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Bonang dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bonang memerlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Bonang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Bonang Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak.

Bonang, Juli 2022

Camat Bonang
Kabupaten Demak

HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19760606 199501 1 001

Lampiran Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang					Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi	Angka	Nilai Evaluasi terhadap lima komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%) dan Pelaporan Kinerja (Bobot 15 %) dan Evaluasi Kinerja Internal (10%) serta Pencapaian sasaran/kinerja Organisasi (20 %)
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang				Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase dari capaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persen	$\frac{E \text{ Indikator kinerja yang mencatat target}}{E \text{ seluruh Indikator Kinerja}} \times 100\%$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Bonang yang ditindaklanjuti	Monev Internal Triwulan yang Ditindaklanjuti	Persen	$\frac{E \text{ Rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti}}{E \text{ Seluruh hasil monev yang ada di Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Bonang					Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Angka	$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai Penimbangan}$
	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif				Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Keluhan Masyarakat yang masuk ke Kecamatan Bonang yang telah ditindaklanjuti	Persen	$\frac{E \text{ Keluhan yang ditindaklanjuti}}{E \text{ seluruh keluhan yang masuk}} \times 100\%$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	Pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan standarnya	Persen	$\frac{E \text{ Layanan yang dilakukan sesuai SOP}}{E \text{ Seluruh Layanan}} \times 100\%$

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen	$\frac{E \text{ Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik}}{E \text{ Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik}} \times 100\%$
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Persentase dari Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang aktif	Persen	$\frac{E \text{ Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik}}{E \text{ Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik}} \times 100\%$
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan Keamanan Wilayah	Persentase desa yang memiliki Keamanan Wilayah	Persen	$\frac{E \text{ Desa yang memiliki keamanan wilayah}}{E \text{ Seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan}} \times 100\%$
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Persen	$\frac{E \text{ Desa yang memiliki keamanan wilayah}}{E \text{ Seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan}} \times 100\%$
		PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persen	$\frac{E \text{ Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan asset pemdes}}{E \text{ Seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$